

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman yang dapat disimpulkan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan, pada bab pertama hingga pada bab terakhir, setidaknya dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran yang dapat disimpulkan sebagai berikut yang juga merupakan jawaban atas rumusan masalah :

Pertama, Konsep *civil society* memiliki pengertian suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku. Tindakan dan refleksi mandiri, tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat, terjaminnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri dari masyarakat itu dalam kaitannya dengan kepentingan Negara.

Konsep *civil society* yang telah dikemukakan di atas, mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat bukan Negara. Pemberdayaan masyarakat dalam keberadaannya berhubungan dengan Negara. Mengenai fungsi dan peran *civil society* yakni memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan kepentingan Negara.

Dengan mengembangkan *civil society*, kita bisa berharap kelak masyarakat tidak menggantungkan nasibnya pada Negara. Sehingga bagaimana masyarakat bisa merasa siap dan mampu mengakses sumberdaya politik, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya, selanjutnya menjaga independensinya dari intervensi Negara.

Kedua, Ciri-ciri *civil society* dalam perspektif Hikam sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), contohnya seperti :

1. Banyaknya Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yang mempunyai kekuatan untuk memposisikan dirinya (kelompok) dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan Negara merupakan wujud nyata dari adanya *civil society*.
2. Eksistensi lembaga-lembaga yang dimiliki oleh PCNU Sidoarjo yang dengan berbagai program kerjanya berusaha untuk meningkatkan sumberdaya manusia di wilayah Sidoarjo, praktek-praktek pendampingan terhadap masyarakat di hadapan institusi Negara, juga bukti konkrit yang mendukung terbentuknya *civil society*.

Ketiga, proses berkembangnya *civil society* di Sidoarjo yakni dimulai dengan adanya gerakan sosial secara tidak langsung muncul sebagai manifestasi dari keputusan dan depresi, dimana perasaan ditindas dan dieksploitasi pada rakyat yang tidak punya pengaruh, telah menumbuhkan tuntutan penuh keadilan sosial dan ruang yang lebih bagi manuver-manuver. Gerakan sosial ini merupakan indikasi dari berkembangnya *civil society* di Sidoarjo.

Keempat, karena NU mempunyai tujuan yang sangat besar dan global, yang tidak mungkin direalisasikan dengan program-program kerja secara sentralisasi, tanpa perangkat organisasi, adapun perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari :

- a. Lembaga : perangkat departementasi organisasi Nahdlatul ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan suatu bidang tertentu.
- b. Lajnah : perangkat organisasi NU yang berfungsi melaksanakan program NU yang karena sifat program tersebut memerlukan penanganan khusus.
- c. Badan otonom : perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi membantu pelaksanaan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu yang beranggotakan perorangan.

Kelima, terkait program kerja PCNU Sidoarjo, Nahdlatul ulama telah banyak merealisasikan program-programnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, melalui pemberdayaan sumberdaya manusia, hal ini mencerminkan bahwa NU telah berjuang mewujudkan *civil society*.

Selanjutnya tentang peluang NU cabang Sidoarjo dalam mewujudkan *civil society*. Pertama, basis massa NU yang cukup besar, keterlibatan langsung elit PCNU Sidoarjo dalam pemecahan masalah yang bersumber dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan masyarakat. Kedua, perubahan paradigma politik Indonesia, dan duduknya kader NU cabang Sidoarjo dalam birokrasi, legislatif, dan eksekutif, dapat membantu kelancaran gerakan pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, kecenderungan dunia Internasioanal mendukung berkembangnya masyarakat sipil. Era reformasi juga memberi ruang bagi keterbukaan dan membuka peluang seluas luasnya bagi masyarakat sipil untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan.

Sedangkan tantangan NU cabang Sidoarjo dalam mewujudkan *civil society*. Pertama, modernitas dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru dapat mempengaruhi perilaku, moralitas dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah. Modernisasi misalnya, berdampak pada sikap individualisme dan persaingan ketat dalam mempertahankan hidup, yang pada sikap tertentu mempengaruhi sistem hubungan sosial.

Kedua, tidak menutup kemungkinan NU juga akan larut dalam koridor politik praktis. Sudah sering di jumpai, aksi-aksi NU dalam acara-acara NU di politisir demi kepentingan politik.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.